

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi *Financial Distress* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Harma Sri Lidia Rahmi^{1*}, Vita Fitria Sari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

*Korespondensi: harmalilik652@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of local government characteristics (Decentralization, Area and Government Complexity) on financial distress in districts/cities in West Sumatra Province from 2016-2020. The data in this study uses secondary data that is processed from local government financial reports (LKPD) from the Supreme Audit Agency of West Sumatra Province and the area and number of Regional Apparatus Work Units (SKPD) from the Central Statistics Agency of West Sumatra Province. The sampling technique in this study used the total sampling method with a sample of 19 districts/cities with a period of 5 years. Data analysis using multiple regression analysis. The results of this study indicate that there is one variable characteristic of local government, namely the area that has a significant influence on financial distress in a positive direction, for other variables the characteristics of local governments have an insignificant relationship where the direction of the negative relationship consists of the number of SKPD, and for the direction of the relationship positive consists of decentralization.

Keywords: *local government finance; characteristic of local government; financial distress.*

How to cite

Rahmi, H.S.L & Sari, V.F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145-156. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pemakai. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat keadaan keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan yang kurang baik akan berdampak pada pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pratiwi (2018) menyatakan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik pada tingkat yang layak dapat diartikan sebagai *financial distress*. Menurut Cohen & Zopounidis (2011) kondisi keuangan pemerintah yang baik ditandai dengan kemampuan pemerintah

untuk membayar kewajiban keuangan dan kewajiban pelayanan kepada rakyatnya untuk saat ini dan dimasa yang akan datang.

Turunnya belanja infrastruktur dan investasi modal untuk membayar pengeluaran lainnya dapat menyebabkan tekanan keuangan pada pemerintah daerah (Bumgarner *et al*, 1991). Pemerintah daerah diharapkan dapat berinvestasi dan memelihara infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur Kabupaten/Kota dan Provinsi diseluruh Indonesia, anggarannya didominasi oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan (Syurmita, 2014). Hal ini akan mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Zakia, 2021).

Banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas program otonomi daerah di Indonesia setelah lebih dari 10 tahun berjalan. Temuan lembaga independen FITRA (Forum Transparansi Indonesia) yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan otonomi daerah juga menunjukkan bahwa situasi keuangan daerah saat ini sedang cenderung kritis dan mengkhawatirkan (Pratiwi, 2014). Cara pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah mengakibatkan banyak pengeluaran rutin yang tidak terlalu produktif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) No. 2 Tahun 2015 menyebutkan porsi belanja modal minimal 30%, sedangkan belanja pegawai kurang dari 30%. Namun, pada kenyataannya belanja pegawai melebihi belanja modal. Rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan baru dalam meningkatkan porsi belanja modalnya. Pemborosan belanja pegawai dinilai menjadi penyebab utama masalah keuangan yang bisa berujung pada kebangkrutan. Jika pemerintah secara rutin merekrut pegawai baru, hal ini akan menyebabkan berkurangnya dana yang tersedia untuk fasilitas umum, pembangunan daerah, minimnya pelayanan yang berkualitas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat tidak adil. Hal ini karena belanja modal lebih tinggi dari belanja modal (Fuad, 2018). Salah satu daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari belanja modal adalah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai komposisi belanja modal masih dibawah 30%. Komposisi jenis belanja APBD sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh belanja pegawai dengan porsi di atas 40%. Belanja modal yang identik dengan pembangunan infrastruktur justru stagnan hanya dikisaran 20% dari total belanja (djpb.kemenkeu.go.id). Fenomena tersebut menandakan alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berada dibawah standar minimum yang telah ditentukan. Artinya pemerintah daerah belum mampu untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, sehingga kemungkinan terjadinya resiko *financial distress* akan tinggi. Prediksi *financial distress* bisa dijadikan bahan evaluasi oleh pemda untuk menilai bagaimana kinerjanya, apakah sudah maksimal atau perlu perbaikan dalam segi apapun untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan adanya prediksi *financial distress* ini maka pemerintah bisa berbenah diri untuk mengoptimal pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat.

Beberapa peneliti sebelumnya mengukur *financial distress* dengan menggunakan rasio belanja modal dan rasio hutang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengukuran *financial distress* menggunakan rasio belanja modal, karena tidak semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki hutang. Belanja modal merupakan hal penting yang menggambarkan pelayanan publik. Jika persentase dana yang dialokasikan terhadap belanja modal sedikit, maka dampaknya akan berpengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan. Sehingga, pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat tidak tercapai dan mengalami kondisi *financial distress* akan semakin besar.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor keuangan dan non keuangan yang mengakibatkan *financial distress*. Faktor-faktor tersebut adalah keselarasan belanja (Fitrah, dkk 2021), kemandirian (Wulandari dan Arza 2020, Charoline dkk. 2020), desentralisasi (Syurmita 2014), pemekaran wilayah (Husniati 2016), kompleksitas pemerintah (Sari dan Arza 2019) dan beberapa faktor lainnya. Penelitian ini memfokuskan pada 3 hal yang mempengaruhi *financial distress* yaitu desentralisasi, luas wilayah dan kompleksitas pemerintah. Dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, dimana penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai kondisi *financial distress* dengan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada faktor non keuangan yaitu karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan dengan derajat desentralisasi dan luas wilayah yang mengacu pada penelitian (Sari & Arza, 2019), (Syurmita, 2014) dan (Jones dan Walker, 2007) dan menambahkan satu variabel independen yakni kompleksitas pemerintah yang diprosikan dengan jumlah SKPD. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggabungkan faktor keuangan dan non keuangan untuk memprediksi *financial distress* di pemerintahan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling, (1976) mengungkapkan hubungan keagenan antara dua pihak, yakni *principal* dan *agent* dalam pengambilan keputusan atas nama *principal*. Di pemerintahan teori keagenan dilihat dari hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan agar pemerintah daerah mandiri dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hubungan keagenan antara pemda dengan masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya dan pemda selaku *agent* harus bisa mengelolanya dengan baik.

Teori Kebangkrutan

Sartika (2016) mengungkapkan kebangkrutan ialah ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam mendapatkan keuntungan saat menjalankan kegiatan operasional perusahaannya sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam sumber pendanaan. Mastuti, dkk (2013) menjelaskan bahwa tidak mampunya pemda untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakatnya ataupun dalam memenuhi pelayanan publik bisa dilihat sebagai kebangkrutan.

Platt (2002) kesulitan keuangan ialah tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum *likuidasi* ataupun kebangkrutan terjadi. Prediksi kebangkrutan harus dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengurangi tingkat risiko dan bahaya kebangkrutan perusahaan (Alkhatib & Bzour, 2011). Teori kebangkrutan dalam sektor publik menjelaskan kesulitan pemda untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas.

Teori Ketimpangan Wilayah

Kesenjangan luas antar wilayah ialah aspek umum kegiatan ekonomi suatu wilayah. Kesenjangan antar wilayah ini terjadi karena perbedaan luas daerah dan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Perbedaan ini merupakan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, setiap daerah dikelompokkan dalam dua kategori yakni ada daerah maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan antar daerah akan berengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ketimpangan pembangunan

antar daerah ini berhubungan dengan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemda (Sjafrizal, 2008). Pemda yang wilayahnya luas akan terindikasi mengalami *financial distress*, karena semakin luas suatu daerah maka pemenuhan pelayanan publik juga akan banyak.

Financial Distress

Financial distress adalah tidak mempunya entitas untuk mencapai tujuannya karena berbagai kendala, atau tidak mempunya untuk memberikan pelayanan, sehingga terjadinya kebangkrutan. Kesulitan keuangan dapat muncul dalam organisasi swasta dan organisasi publik dimana sektor swasta adalah bisnis dan publik adalah pemerintah. Menurut Jones dan Walker (2007), *financial distress* dalam pemerintahan disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang memadai. Hal ini dikarenakan kurangnya dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan kebutuhan lainnya serta ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan desentralisasi ialah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi menjelaskan kontribusi PAD dalam pelaksanaan desentralisasi. PAD ialah kekuasaan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan serta pengaturan daerah, sehingga pemda yang mempunyai PAD tinggi akan menggambarkan desentralisasi yang tinggi juga dalam penyelenggaraan otonomi daerah sehingga pemda bisa mengoptimalkan belanja modal dengan menerapkan kebijakan yang lebih banyak.

Luas Wilayah

Wilayah ialah suatu kesatuan geografis dengan beberapa unsur yang mempunyai batas-batas dan ditetapkan menurut aspek administratif dan fungsional (Sari & Arza, 2019). Luas wilayah menjelaskan tindakan pemda memberikan pelayanan disetiap wilayah. Marfiana dan Kurniasih (2014), menjelaskan wilayah pemerintahan daerah di kabupaten lebih besar daripada wilayah pemerintahan kota. Ukuran luas daerah dalam indeksasi keadilan daerah dapat dilihat dari luas daerah masing-masing.

Kompleksitas Pemerintah

Kompleksitas ialah suatu keadaan dengan berbagai faktor baik dilingkungan internal maupun eksternal yang mempengaruhi sebuah entitas (Khasanah, 2014). Kompleksitas pemerintahan memiliki arti suatu keadaan dimana pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan karakteristik yang berbeda. Hilmi (2011) mendefinisikan kompleksitas pemerintahan dengan menggunakan populasi dan jumlah SKPD. Variabel kompleksitas pemerintahan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan jumlah SKPD, karena jumlah SKPD disetiap daerah jumlahnya berbeda.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Desentralisasi terhadap Financial Distress

Teori keagenan dalam pemerintahan bisa dilihat dari hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya dan pemerintah sebagai agent seharusnya bisa mengelola dengan baik. Namun, masalah keagenan yang muncul yaitu pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan peluang yang baik bagi para

pengelola pemerintah daerah untuk menunjukkan pengabdianya kepada masyarakat, sekaligus menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk berbenah diri dalam proses pelaksanaannya.

Desentralisasi bisa dijadikan ukuran untuk memprediksi *financial distress*. Semakin tinggi desentralisasi di suatu daerah, maka tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) akan semakin rendah. Daerah yang mempunyai PAD tinggi bisa menyelenggarakan desentralisasi dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak (Sari dan Arza, 2019). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Derajat desentralisasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Hubungan Luas Wilayah terhadap Financial Distress

Teori ketimpangan wilayah menjelaskan kesenjangan antar wilayah ialah hal yang lumrah dalam kegiatan ekonomi. Ketimpangan ini karena perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi di setiap daerah. Perbedaan ini menjelaskan kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Semakin luas wilayah maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ukuran luas wilayah bisa digunakan untuk memprediksi kemungkinan kesulitan keuangan daerah. Pemda dengan luas wilayah besar memiliki kemungkinan besar mengalami kesulitan keuangan karena pemenuhan pelayanan juga akan semakin banyak, dibandingkan dengan daerah yang kecil. Wicaksono (2015) mengungkapkan luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap *financial distress*

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Financial Distress

Teori kebangkrutan menjelaskan hubungan yang erat antara *financial distress* dengan kebangkrutan. Jones & Walker (2014) yang dikutip oleh Syurmita 2014 menjelaskan bahwa pada sektor publik “kesulitan keuangan” atau *financial distress* adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan jumlah SKPD sebagai proksi kompleksitas pemerintah. Banyaknya jumlah SKPD menggambarkan pemborosan dalam alokasi pengeluaran pemerintah dalam segi belanja pegawai. Semakin banyak jumlah SKPD di daerah maka indikasi terjadinya *financial distress* akan semakin tinggi karena alokasi untuk pengeluaran lebih banyak ke belanja pegawai dibandingkan belanja modal/investasi. Dimana, belanja modal lebih penting perannya untuk mensejahterakan masyarakat. Sari (2019), mengungkapkan kompleksitas pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini kuantitatif. Dimana penelitian ini menggambarkan bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi *financial distress*. Populasi penelitian ialah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengambilan sampel menggunakan *total sampling* yang menjadikan seluruh populasi sebagai sampel. Jenis data yang digunakan yaitu sekunder. Penelitian ini menggunakan *pooled data* yaitu gabungan antara data *time series* dengan data *cross section* berupa data laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), data luas wilayah dan jumlah SKPD dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik

dokumentasi selain itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen penelitian ini *financial distress*. Pengukurannya membandingkan belanja modal dengan belanja total belanja daerah. Sedangkan variabel independen penelitiann ini desentralisasi, luas wilayah serta kompleksitas pemerintah. Desentralisasi diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Kompleksitas pemerintahan diukur dengan banyaknya jumlah SKPD disetiap daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan hal yang ditemukan dari hasil penelitian dan memberikan informasi dilapangan serta menginterpretasikan nilai maksimum, minimum, rata-rata, *mean* dan standar deviasi dengan tujuan agar data lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi:

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Financial Distress	95	644	3478	1987,21	565,154
Desentralisasi	95	1	2622	980,33	448,620
Luas wilayah	95	2300	601135	223373,11	193898,624
Kompleksitas pemerintah	95	18	44	35,63	7,510
Valid (listwise)	N 95				

Sumber: Data diolah tahun 2022

Tabel 1 diatas menjelaskan rasio desentralisasi selama 5 tahun ialah 0,98 (98%) dengan nilai rasio desentralisasi tertinggi 2,62 (262%) dan nilai rasio desentralisasi terendah 1,00 (1%). Standar deviasi atau simpangan baku adalah sebesar 0,44. Nilai tersebut kecil dari nilai mean yang berarti tingkat sebaran rasio desentralisasi mempunyai variasi yang kecil atau homo. Rata-rata (mean) dari luas wilayah ialah 0,22 (22%) dengan nilai luas wilayah tertinggi (maksimum) sebesar 0,60 (60%) dan nilai luas wilayah terendah (minimum) sebesar 0,23 (23%). Standar deviasi atau simpangan baku adalah sebesar 0,19 nilai tersebut kecil dari nilai mean yang berarti tingkat sebaran luas wilayah mempunyai variasi yang kecil atau homo. Rata-rata (mean) dari kompleksitas pemerintah ialah 35,6 (356%) dengan nilai kompleksitas pemerintah tertinggi 0,35 (35%) dan nilai kompleksitas pemerintah terendah 0,18 (18%). Standar deviasi kompleksitas pemerintah 7,51. Nilai tersebut kecil dari nilai mean yang berarti tingkat sebaran kompleksitas pemerintah mempunyai variasi yang kecil atau homo. Rata-rata (mean) dari *financial distress* ialah 1987,21 (198%) dengan nilai rasio belanja modal tertinggi 3,47 (347%) dan nilai rasio belanja modal terendah 6,44 (644%). Standar deviasi *financial distress* 565,154. Nilai tersebut kecil dari nilai mean yang berarti tingkat sebaran rasio belanja modal mempunyai variasi yang kecil atau homo.

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2		
Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	539,43084362
Most Extreme Differences	Absolute	,55
	Positive	,044
	Negative	-,055
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah tahun 2022

Tabel 2 menggambarkan nilai signifikan Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sesuai konsep uji normalitas yakni jika nilai signifikan uji Kolmogorov- Smirnov $> 0,05$ maka distribusi data berdistribusi normal.

Uji Multikoloniaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik menggambarkan tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian multikolinieritas terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3		
Uji Multikoloniaritas		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Desentralisasi	,728	1,373
Luas wilayah	,477	2,096
Kompleksitas pemerintah	,558	1,792

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 Uji Multikoloniaritas diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 sedangkan untuk nilai VIF pada keseluruhan variabel independen mempunyai nilai VIF kecil dari 10,00 maka pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas ialah tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian yang tidak sama untuk variabel bebas yang berbeda. Berikut nilai signifikansi (Sig) dari hasil analisis menggunakan Glejser.

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,074	,017		4,338	<,001
Desentralisasi	-,033	,084	-,047	-,389	,698
Luas wilayah	1,221	,000	,076	,511	,611
Jumlah skpd	-,001	,001	-,204	-1,477	,143

a. Dependent Variable: Abs RES

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil output glejser pada tabel 4 diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) untuk variabel desentralisasi bernilai 0,698 lebih besar dari 0,05 ($0,698 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai signifikansi (Sig) untuk variabel luas wilayah bernilai 0,611 lebih besar dari 0,05 ($0,611 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Nilai signifikansi (Sig) untuk variabel jumlah SKPD bernilai 0,143 lebih besar dari 0,05 ($0,143 > 0,05$) artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 3 variabel independen, sehingga model regresi yang baik dapat tercapai.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut persamaan yang digunakan:

$$Y = 2628,908 + 0,201X_1 + 0,001X_2 - 29,641X_3$$

Keterangan :

Y = Financial distress

X_1 = Rasio desentralisasi

X_2 = Luas wilayah

X_3 = Jumlah SKPD

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2628,908	302,645		8,686	,000
Desentralisasi	,201	,148	,159	1,359	,178
Luas wilayah	,001	,000	,334	2,309	,023

Kompleksitas pemerintah	-29,641	10,078	-,394	-2,941	,004
-------------------------	---------	--------	-------	--------	------

a. Dependent Variable: *Financial Distress*

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil pengolahan dari persamaan regresi diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut. Konstanta bernilai 2628,908 yang menjelaskan tanpa pengaruh variabel independen yakni desentralisasi, luas wilayah dan kompleksitas pemerintah. Sehingga nilai dari *financial distress* sebagai variabel dependen atau variabel terikat adalah 2628,908. Nilai koefisien variabel desentralisasi sebesar 0,201 artinya apabila desentralisasi meningkat maka *financial distress* akan naik sebesar 0,201 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol. Nilai luas wilayah sebesar 0,001 artinya apabila luas wilayah meningkat maka *financial distress* naik sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol. Nilai kompleksitas pemerintah sebesar -29,641 artinya apabila kompleksitas pemerintah meningkat maka *financial distress* akan turun sebesar 29,641 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi menggambarkan seberapa mampu variabel bebas menerangkan variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,298 ^a	,089	,059	548,250

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” diatas, nilai determinasi atau Adjusted R Square sebesar 0,059 atau 5,9%. Artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress* sedangkan sisanya (100% 5,9% =94,1%) dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F

Uji F dilakukan untuk membandingkan F hitung dengan F table. F table dalam analisis data ini ialah (k; n-k) atau (3; 95-3)= (3; 92) yang berarti nilai F table adalah 0,1169.

Tabel 7
Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2670808,095	3	890269,365	2,962	,036 ^b
Residual	27352649,695	91	300578,568		
Total	30023457,789	94			

Sumber: Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel uji f nilai Sig. sebesar 0,036. Nilai sig. 0,036 lebih kecil dari 0,05 (0,036 < 0,05) maka berdasarkan konsep uji F disimpulkan hipotesis diterima atau variabel desentralisasi, luas wilayah dan kompleksitas pemerintah secara simultan berpengaruh

terhadap *financial distress*. F hitung sebesar 2,962 lebih besar dari F tabel 0,1169 (F hitung 2,962 > F tabel 0,1169) maka disimpulkan hipotesis diterima artinya seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress*.

Pembahasan

Pengaruh desentralisasi terhadap *financial distress*

Hasil pengujian H_1 memiliki nilai signifikansi 0,178 dan koefisien sebesar 0,201. Nilai signifikansi desentralisasi lebih besar dari 0,05 ($0,178 > 0,05$) artinya desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap *financial distress*. Nilai koefisien desentralisasi positif 0,201 berbeda dengan hipotesis desentralisasi yang negatif terhadap *financial distress* sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil uji F menjelaskan secara simultan desentralisasi mampu mempengaruhi *financial distress* namun secara parsial desentralisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

Pengaruh luas wilayah terhadap *financial distress*

Hasil pengujian H_2 nilai signifikan yang didapat 0,023 dan nilai koefisien 0,001. Nilai signifikan kecil dari 0,05 ($0,023 < 0,05$) artinya luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* sedangkan nilai koefisien memiliki arah positif sama dengan arah H_2 yang juga berarah positif oleh karena itu hipotesis kedua (H_2) diterima.

Pengaruh kompleksitas pemerintah terhadap *financial distress*

Hasil pengujian H_3 nilai signifikan yang diperoleh 0,004 dan nilai koefisien -29,641. Kompleksitas pemerintah menggunakan proksi jumlah SKPD. Nilai signifikan jumlah SKPD kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) artinya jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun koefisien jumlah SKPD memiliki arah negatif berbeda dengan H_3 yang berarah positif sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hasil uji F menjelaskan secara simultan jumlah SKPD mampu mempengaruhi *financial distress* namun secara parsial jumlah SKPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan olah data dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk variabel desentralisasi berpengaruh tidak signifikan. Koefisien desentralisasi bernilai positif berbeda dengan H_1 yang berarah negatif. variabel luas wilayah berpengaruh signifikan. Koefisien luas wilayah memiliki arah positif sama dengan H_2 yang berarah positif, dan untuk variabel kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan. Namun nilai koefisien memiliki arah negatif dan berbeda dengan H_3 yang berarah positif.

Saran

Beberapa saran yang mungkin berguna penulis sampaikan diantaranya: bagi pemerintah, Jadikan hasil penelitian prediksi *financial distress* ini sebagai bahan evaluasi untuk lebih memperhatikan kesenjangan antara alokasi belanja rutin/pegawai dengan belanja investasi/modal, dimana belanja investasi/modal lebih penting untuk memenuhi pelayanan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mencari variabel lain yang mempengaruhi prediksi *financial distress*, baik itu dari faktor keuangan maupun dari faktor karakteristik pemerintahan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bumgarner, M., Martinez-Vazquez, J., & Sjoquist, D. L. (1991). Municipal Capital Maintenance and Fiscal Distress. In *Source: The Review of Economics and Statistics* (Vol. 73, Issue 1). The MIT Press.
- Cohen, Sandra & Doumpos, Michael & Neofytou, Evi & Zopounidis, Constantin, 2012. "Assessing financial distress where bankruptcy is not an option: An alternative approach for local municipalities," *European Journal of Operational Research*, Elsevier, vol. 218(1), pages 270-279.
- Christiaens, Johan and Vincent V. Pateghem. 2007. Governmental Accounting Reform: Evolution of The Implementation in Flemish Municipalities. *Financial Accountability & Management*, 23(4), 0267-4424.
- Damayanti, R. (2018). Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016. *Jurnal Akuntansi*.
- Dana, D. A. N., Khusus, A., Belanja, T., Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). 68-67-2-Pb. 5.
- Dunan, H., & Efriyanti, F. (2017). Analisis Financial Distress Dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Laporan Akhir Penelitian Produk Terapan*, 1–63.
- Dwitayani, Y., Armaini, R., & Aprianti, S. (2017). *Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan*. 137–144.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Fitrah Illahi., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Dan Keselarasan Belanja Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(3), 543–556.
- Fuad, K. (2018). Metode Prediksi Financial Distress Di Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.26460/ad.v2i1.2008>.
- Halim, A., Moi, M. O. V., & Baswir, R. (2017). Fiscal Distress of Local Government Study on Regencies/Cities in the Provinces of East Nusa Tenggara, Maluku, and North Maluku. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(2), 152. <https://doi.org/10.15294/jda.v8i2.9315>.
- Iqbal (2017). Analisis faktor-faktor kemungkinan terjadinya financial distress pada kabupaten/kota di indonesia.
- Jones, Stewart and David A. Henser. 2004. Predicting Firm Financial Distress: A Mixed Logit Model. *Accounting Review* Vol.79 No.4 pp 1011-1038.
- Joshi, A. (2006). Disclosure practices in corporate reporting of public sector financial institutions (PSFs). *Acrm*, 1(1), 30–33. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=919100. Diakses pada 4 Mei 2022
- Placas, C. D. E. (2015). *BAB I PENDAHULUAN, Latar Belakang Masalah Skripsi. 2015*, 1–239. http://eprints.ums.ac.id/14213/2/BAB_I.pdf.
- Plat, H, dan M.B Platt. 2002. Predicting Financial distress. *Journal of Financial Service Profesional*, 56: 12-15.
- Pratiwi, (2018) Prediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang. Standar Akuntansi Pemerintah.
- Salah, M., & Syarat, S. (2012). *Financial Distress Pemerintah Daerah Jawa Timur*.
- Salsabila, D. N., Nurhaniza, I., Nopiyani, Apriyanty, T., & Nababan, D. (2020). The Effect of Original Local Government Revenue and Special Allocation Funds on Capital Expenditure of Bandung City in 2008-2018. *Journal Of Archaeology of Egyptology, Vol.17 No.5,2020 ISSN 1567-2143, 17(5)*, 1008–1023.
- Sari, E. R., & Yulianto, M. R. (2018). Akurasi Pengukuran Financial Distress Menggunakan Metode Springate dan Zmijewski pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 5(2)*, 276–285. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.167>.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi, 7(1)*, 1425. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566>.
- Sudarsana, Hafidh Susila. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutaryo, dkk. 2010. Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Syurmita. 2014. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.
- Tubels, Agus. 2015. Evaluasi Financial Distress Pada Pemerintahan Bandar Lampung.
- Waninda, W., & Arza, F. I. (2019). Relevansi Informasi Laporan Keuangan Accrual Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se- Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2)*, 795–813. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.111>.
- Wicaksono A. (2015). Financial Distress pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.
- Windiyanti, R., & Isfaatun, E. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan, Rasio Solvabilitas, Kompleksitas, Dan Umur Pemerintahan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 1(1)*, 49–60. <http://ejournal.stienusa.ac.id/index.php/ekowir/article/download/160/125>.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 4(2)*, 100. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.639>.
- Wulandari, Y., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(3)*, 3160–3178. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>.
- Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 3(3)*, 653–671. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>.